

Media Cetak	Harian Fajar
Tanggal	Senin 13 Januari 2025
Wilayah	Kota Palopo



Sampah Meluber ke Jalan Nasional

Sampah Meluber ke Jalan Nasional

PALOPO, FAJAR — Sampah tak tertangani baik di Kota Palopo. Bahkan, meluber ke jalan nasional.

Sampah-sampah bertumpukan dan berserakan di pinggir Jalan Trans Sulawesi. Kondisi itu menimbulkan bau tak sedap. Lokasinya di poros Palopo-Masamba, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo.

Warga Kecamatan Telluwanua, Darwis, mengungkapkan tumpukan sampah sudah seminggu lebih belum diangkut oleh petugas kebersihan. Bau tak sedap mengganggu warga sekitar.

"Kalau kendaraan lewat,

baunya terbawa angin," ujar Darwis kepada FAJAR, Minggu, 12 Januari 2025.

Ia berharap Pemerintah Kota Palopo segera mengambil tindakan untuk membersihkan sampah tersebut. "Sudah lama dibiarkan, tidak bagus dilihat, apalagi sudah busuk begini, dan lokasinya di pinggir jalan raya," katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palopo Emil Nugraha Salam menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan kelurahan dan pengawas persampahan untuk menangani masalah ini.

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan armada pengangkut sampah. "Jumlah armada yang beroperasi di DLH hanya tujuh unit *dump truck*, satu unit kompaktor, dan empat unit Grand Max pikap. Hal ini membuat pengangkutan sampah di Kota Palopo sedikit terhambat," jelasnya.

Lima unit *dump truck* lainnya tidak beroperasi karena terkendala masalah hukum. "Jika persoalan hukum ini selesai, lima unit *dump truck* tersebut dapat digunakan kembali untuk pengangkutan sampah,"

katanya.

DLH juga telah menetapkan dua kecamatan sebagai percontohan pengelolaan sampah tahun ini, yakni Kecamatan Wara dan Wara Timur. Keduanya mendapatkan anggaran penuh untuk pengelolaan persampahan.

"Kami berencana melimpahkan kewenangan pengelolaan sampah ke kecamatan, seperti yang diterapkan di Kota Makassar. Operasional dan tenaga kerja akan melekat di kecamatan agar tanggung jawab lebih terfokus," akunya.

Dia mengakui masih ada

kendala dalam operasional pengangkutan sampah, terutama biaya operasional kendaraan kelurahan dan motor sampah yang jumlahnya hanya 14 unit.

"Kami berbicara soal pengurangan dan pengelolaan sampah. Artinya sarana dan prasarana harus dilengkapi terlebih dahulu. Jika itu sudah lengkap, edukasi ke masyarakat dapat berjalan maksimal. Kami berharap wali kota ke depan dapat lebih memperhatikan masalah persampahan ini, karena masyarakat tidak mau tahu soal kendala kami," pungkasnya. **(bso/zuk)**